

BAB I

PENDAHULUAN RUSUNAWA DI KELURAHAN BENER KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA MELALUI TATA BENTUK LOKAL DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HUMANISME

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08 persen dengan pendapatan perkapita Rp.122.951.000 (PDRB ADHB, 2023). Angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta senilai 5,7 persen dan Nasional senilai 5,05 persen (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023). Berdasarkan hal ini Kota Yogyakarta menjadi lingkungan hidup yang memiliki daya tarik bagi penduduk luar Kota Yogyakarta untuk datang bermukim serta meningkatkan taraf ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, secara langsung akan berdampak pada laju pertumbuhan penduduk suatu daerah (Warren Thompson, 1929). Laju pertumbuhan penduduk pertahun 2023 Kota Yogyakarta senilai 0,62 persen, kepadatan 11.659 orang/Km², dengan jumlah penduduk 375.700,00 jiwa. (BPS, 2023) Sebaran jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Umbulharjo Kelurahan Sorosutan sebesar 15.868 jiwa dan sebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Gondokusuman Kelurahan Kotabaru sebesar 3.073 jiwa (BPS, 2023).

Ketika populasi meningkat, sumber daya akan semakin terbatas sehingga memunculkan ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan dasar (Robert Malthus, 1898). Konsep memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu konsep memandang ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Pada proses pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kota Yogyakarta, menunjukkan fakta masih tingginya ketidakmampuan dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar yang dibuktikan dari angka kemiskinan yang masih mencapai 6,49% (BPS, 2023).

Rumah berada pada tingkatan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman dalam

hierarki kebutuhan manusia dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (Abraham Maslow, 1943). Angka kemiskinan Kota Yogyakarta yang di dapatkan kemudian mengungkap angka ketidakmampuan masyarakat dalam memiliki hunian. Berdasarkan prosentase rumah tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tinggal Kabupaten/kota 2023, dengan tingkat kepadatan penduduk 11.659 orang/Km², prosentase rumah tangga memiliki hunian milik sendiri berada pada angka 54,73 persen dan 45,27 persen rumah tangga memiliki hunian bukan milik sendiri, dengan keseluruhan penggunaan lahan pemukiman sebesar 64,71 persen (BPS, 2023).

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tujuan tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Berdasarkan angka masyarakat belum memiliki kepastian hunian milik sendiri, menimbulkan hunian-hunian di area-area kota yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaannya. Secara fisik hunian yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaannya dapat dilihat di bantaran Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, pasar, daerah sub urban, dan area pinggiran rel kereta api (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2023).

Menanggapi fakta kebutuhan hunian dan Undang-Undang yang berlaku, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang rumah susun. Peraturan tersebut tertuang beberapa pasal perencanaan dan pengadaan rumah susun yaitu, BAB I Pasal 1 menyatakan rumah susun umum adalah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, BAB I Pasal 1 Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. BAB II bagian kesatu pasal 4 menyatakan, pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba atau badan usaha. BAB III perencanaan bagian ke kedua penyediaan tanah pasal 15 Ayat 1, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bertanggungjawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum sewa. Ayat 2, Tanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rencana tata ruang wilayah daerah.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan hunian, terbatasnya ruang untuk permukiman, berlakunya Undang-Undang RI dan Perda Pemerintah

Yogyakarta tentang rumah susun. Pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam hal ini mempunyai peran dan bertanggung jawab untuk terwujudnya pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun, mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Selain membantu masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah, perancangan rumah susun diperlukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bertambahnya permukiman tidak sesuai regulasi yang berlaku dan bertambahnya permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

Pemerintah kota menanggapi fakta yang ada dengan melakukan rencana pembangunan hunian melalui penggunaan lahan sempit dan terbatas, yang di alokasikan untuk pembangunan pemukiman vertikal. Kemudian rencana rancangan program tersebut ditanggapi oleh KRT Surya Satriyanto selaku Penghageng Panitikismo Kasultanan Yogyakarta, dengan mendukung pengajuan dan membantu terlaksananya program tersebut melalui penggunaan lahan pemerintah Kota Yogyakarta bahkan tanah Kasultanan Yogyakarta yang tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta (Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana Solusi Permukiman di Lahan Sempit, Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta 24/09/2023).

1.1.2 Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan umum perumahan rakyat merupakan permasalahan yang menjadi salah satu konsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta. Permasalahan umum perumahan rakyat tersebut sebagai berikut:

1. Standar Ruang per Orang

Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M2002, terdapat masalah mengenai standar kebutuhan rumah minimal. Berdasarkan kebijakan standar internasional, kebutuhan ruang per jiwa adalah 12m² sedangkan kepmen hanya 9m². Hal ini lebih disebabkan oleh keterbatasan daya beli masyarakat, dengan standar ruang ini luas rumah sehat dinyatakan sebesar 30m² hingga 36m², dengan perhitungan komposisi rata-rata empat orang dalam satu keluarga.

2. Pembiayaan Perumahan

- a) *Affordability*, merupakan tingkat keterjangkauan MBR untuk memiliki dan memenuhi kebutuhan rumah tetep rendah, baik dalam hal membeli rumah dari pegembang, membangun secara swadaya, maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.
- b) *Availability*, pembiayaan perumahan MBR, terdapat keterbatasan dana yang di iringi

dengan tidak ada strategi atau pola bantuan yang tersedia.

- c) *Sustainability*, Sumber daya pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek, sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR jangka Panjang.

3. Sebaran Pemukiman Penduduk Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan pemukiman tinggi dan sedang. Wilayah kecamatan dengan kepadatan tinggi antara lain, Kecamatan Mantriweron, Gondokusuman, Margasari, Umbulharjo, dan Kotagede dengan posisi kecamatan-kecamatan tersebut berada di dekat pusat pemerintahan kota (Dinas Pertanahan DIY, 2024). Kecamatan dengan kepadatan pemukiman sedang dan memiliki potensi pengembangan lahan guna pemukiman yang berada di pusat pemerintahan kota yaitu Kecamatan Tegalrejo. Pada dasarnya kecamatan ini memiliki jarak cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kota Yogyakarta dengan kisaran radius 6,7Km, kisaran jarak tempuh 16menit menggunakan kendaraan roda dua, jarak dengan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kisaran radius 3,7Km, kisaran jarak tempuh 9menit menggunakan kendaraan roda dua, dan jarak dengan wilayah pertumbuhan ekonomi seperti area perdagangan jalan Malioboro dengan kisaran radius 3,3 Km, kisaran jarak tempuh 10menit menggunakan kendaraan roda dua. Kecamatan Tegalrejo memiliki peruntukan lahan sebagai pemukiman yang unggul. Data dan kondisi yang ditemukan, perlu adanya sebuah rancangan pemecahan konsentrasi pemukiman penduduk. Diperlukan rencana pengolahan pemukiman di wilayah-wilayah dengan kepadatan sedang, sehingga mengurangi tingkat melambungnya harga tanah dan rumah, serta mengurangi dan mengantisipasi meningkatnya pemukiman tidak layak huni di Kota Yogyakarta.

4. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan akibat pembangunan perumahan wilayah Kota Yogyakarta disebabkan oleh dua faktor, bertambahnya permukiman yang dibangun oleh perseorangan dan bertambahnya kelompok bangunan yang dibangun oleh pengembang (Pemda Kota Yogyakarta, 2023). Kedua hal tersebut memiliki dampak terhadap berkurangnya lahan hijau di wilayah Kota Yogyakarta, saat kepadatan pemukiman mulai naik terjadi pengurangan jumlah area hijau di wilayah kota, penumpukan sampah rumah tangga, dan pembuangan limbah rumah tangga tidak di olah ke area bantaran sungai (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2022).

5. Permukiman Kumuh

Rumah tidak layak huni yaitu keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari

aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yang mudah rusak tertiuip angin; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan (Profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2004).

Peningkatan permukiman kumuh di suatu kota, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhinya. Aspek-aspek tersebut yaitu, aspek lingkungan, karakteristik ekonomi, sosial, serta kelembagaan. Karakter visual permukiman kumuh dapat dilihat dari ketidakserasian pada aspek orientasi, bentuk visual, tipologi, dan aspek kelayakan huni. Karakter visual permukiman kumuh juga terlihat dari indikasi rendahnya aspek pelayanan umum, dan fasilitas perdagangan (Muhammad dan Sulistyarso, 2016).

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945 menyatakan, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di Kota Yogyakarta, Akumulasi jumlah hunian tidak layak, menempati posisi tertinggi dengan nilai 22,38 persen huni Perkabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dengan titik permukiman tidak layak huni tersebar di 16 kecamatan Kota Yogyakarta (BPS, 2023). Permukiman tidak layak tersebut tersebar di bantaran Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, sekitaran pasar, daerah sub urban, permukiman tengah kota, dan area pinggiran rel kereta api (BPS, 2023). Dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban untuk mengurangi luas kawasan kumuh dengan melakukan program-program perencanaan hunian layak huni demi terciptanya perbaikan lingkungan.

Data sebaran hunian tidak layak huni Kota Yogyakarta tersebar di 16 kecamatan, dengan jumlah sebaran hunian tidak layak terbanyak di duduki oleh Kecamatan Tegalrejo dengan jumlah 224 hunian (BPS, 2023). Melihat fakta kebutuhan hunian yang layak di Kota Yogyakarta, maka wilayah dengan krisis hunian layak huni merupakan lingkungan kritis dan memerlukan penanganan serius (Keputusan Walikota No. 393, 2014). Berdasarkan permasalahan kebutuhan hunian layak yang timbul, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menindaklanjuti fakta permasalahan tersebut dengan melakukan pengajuan rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa di wilayah di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Hal tersebut ditujukan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hunian layak huni, khususnya wilayah dengan krisis hunian layak huni (Pemkot Usulkan Pembangunan Rusunawa di Bener, Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta 2023, 24/09/2024).

Beberapa pertanyaan kemudian muncul, seperti bagaimana arsitektur dapat membantu menangani masalah ini dan bagaimana arsitektur dapat menyediakan tempat tinggal yang menyediakan fasilitas kehidupan serta penghidupan sebagai sarana untuk membangun masyarakat. Pendekatan Arsitektur Humanisme dapat membantu dalam perencanaan dan perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta. Pada dasarnya penanganan masalah permukiman terkait dengan standar kriteria hunian yang layak, kerusakan lingkungan, dan kekumuhan dapat diselesaikan dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui lima tingkatan kebutuhan hidup manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana konsep dan wujud Rusunawa Di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menerapkan tatanan bentuk lokal melalui pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar dengan Pendekatan Humanisme?

1.3 Tujuan, Manfaat, dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta bertujuan, yaitu:

1. Merancang rumah susun sederhana yang dapat menyediakan kebutuhan primer dan sekunder bagi penghuni melalui tata bentuk ruang dalam dan luar yang merepresentasikan kearifan lokal.
2. Merancang Rusunawa yang dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur penghuni, serta fasilitas hunian yang berpedoman pada kriteria Rusunawa bagi MBR;
3. Pengoptimalan program pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengurangan pemukiman tidak layak huni.

1.3.2 Manfaat

1. Menurunkan angka pemukiman tidak layak huni melalui hunian dan lingkungan hunian yang lebih layak dan dapat merepresentasikan kearifan bentuk lokal;
2. Memenuhi kebutuhan hunian dan fasilitas hunian bagi MBR;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam menaikkan taraf

- hidupnya dalam segi hunian;
4. Menyediakan hunian dan lingkungan hunian yang mampu menjadi representasi kearifan bentuk lokal Kota Yogyakarta kawasan Rusunawa;
 5. Menjadi area destinasi rekreasi budaya bagi masyarakat lokal Kota Yogyakarta.

1.3.3 Sasaran

Sasaran perancangan Rusunawa Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk MBR Melalui Tata Bentuk Lokal Dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme adalah:

1. Menjadi sarana program pemerintah dalam mengatasi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa yang mampu mereperenrasikan kearifan bentuk lokal dan menjadi destinasi rekreasi budaya bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

1.4 Lingkup Pembahasan

1.4.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, dan variabel yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan batasan ruang lingkup dalam menyusun Proposal Tugas Akhir Arsitektur menjadi tiga bagian, yaitu ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, dan ruang lingkup substansial yang dapat dalam penyusunannya sebagai berikut:

1.4.2 Lingkup Spasial

Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta merupakan cakupan wilayah spasial yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan tapak rusunawa.

1.4.3 Ruang Temporal

Perancangan rumah susun sederhana sewa diharapkan mampu mewadahi serta menjalankan fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan hunian dalam kurun waktu selama kapasitas unit rumah susun dapat menampung kebutuhan unit hunian.

1.4.4 Ruang Substansial

Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dicapai melalui penerapan pendekatan Arsitektur Humanisme, dengan penekanan 4 (empat) aspek, yaitu:

- a) Kualitas manusia;
- b) Kebutuhan layak, aman, dan nyaman;
- c) Keseimbangan masyarakat dalam kehidupan;
- d) Kelangsungan alam dan budaya.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Melakukan observasi, dokumentasi foto, dan pengukuran tapak secara daring melalui google eart maupun secara lansung ke lokasi, guna mendapatkan data-data kondisi eksisting tapak, mengetahui batasan, dan luasan tapak yang dapat menjadi daya dukung perancangan.

2. Data Sekunder

Melakukan literasi terhadap proyek perancangan rumah susun sederhana sewa melalui media informasi seperti program pemerintah terkait dengan kawasan permukiman dan perumahan, buku, jurnal, artikel, dan teori-teori pendekatan arsitektur perilaku (*behaviour setting*). Melakukan pencarian mengenai peraturan dan ketetapan pemerintah terkait persyaratan pembangunan mengenai Garis Sepadan Bangunan (GSB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

1.5.2 Analisis Data

Proses analisis dilakukan setelah penulis mengumpulkan dan mendapatkan data yang diperlukan secara menyeluruh. Data yang telah di dapatkan kemudian dikelompokkan dan diolah. Kelompok data diidentifikasi dan dilanjutkan dengan konsep solutif untuk dijadikan suatu solusi dalam bentuk pemecahan permasalahan yang akan dikembangkan dengan pendekatan Arsitektur Humanisme.

1.5.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan rumah susun sederhana sewa dilakukan melalui pernyataan yang di didapatkan selama proses analisis melalui data-data yang telah temukan. Setelah didapatkan kesimpulan, kemudian dilakukan keputusan akhir terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus mengenai perencanaan dan perancangan rusunawa.

1.6 Keaslian Penulisan

Table 1.1 Keaslian Penulisan, Oleh Penulis 2024

No.	Judul	Penulis	Resume
1.	ASOSIASI DAN DISTRIBUSI SPASIAL PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA.	Mohammad Isnaini Sadali, Fitri Noviyanti, Rifan Andika / Universitas Pendidikan Ganesha dan Internasional Golden Institute	Memetakan serta mengidentifikasi sebaran pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta melalui analisis geospasial.
2.	TTIPOLOGI RUMAH SUSUN DI YOGYAKARTA.	Hestin Mulyandari/ Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY).	Pembahasan mengenai rumah susun di Kota Yogyakarta meliputi beberapa contoh rumah susun yang ada di Kota Yogyakarta antara lain; Rusunawa Jaminahan, Rusunawa Cokrodirjan, dan Rusunawa Jogoyudan yang didalamnya terkandung visi untuk menghadirkan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Di dalam pembahasan pula ditemukan beberapa fakta permasalahan rumah susun di Kota Yogyakarta yaitu; kontrol terhadap iklim melalui bentuk shading yang belum optimal sehingga pencahayaan siang hari tidak optimal, bau di dalam unit hunian dan sirkulasi yang belum sesuai.
3.	PERANCANGAN RUMAH SUSUN	Vira Farhana/Universitas Islam Sunan Ampel	Desain pada perancangan rumah susun ini menitik beratkan pada desain rumah susun

	SEDERHANA SEWA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HUMANISME DI SURABAYA.	Surabaya, 4 Juli 2022.	yang mampu merespon dan mengatasi atas masalah kurangnya pencahayaan dan penghawaan alami, ruang gerak yang minim karena mengesampingkan kebutuhan ruang pengguna, unit yang tidak fleksibel karena tidak disesuaikan dengan kebiasaan pengguna, minimnya luas sirkulasi, ruang koridor sempit, gelap, dan panjang, dan kurangnya ruang terbuka melalui pendekatan arsitektur humanisme dengan pemenuhan lima tingkatan kebutuhan hidup manusia.
--	---	------------------------	--

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Proposal Tugas Akhir Arsitektur Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Membahas latar belakang perencanaan proyek dan permasalahan yang ingin di selesaikan, yang mencakup latar belakang perancangan, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, tujuan perancangan, dan bagaimana proyek dapat dicapai.

BAB II Tinjauan Teori

Mencakup teori dan definisi mengenai perumahan serta kawasan pemukiman, dan teori pendekatan Arsitektur Humanisme berdasarkan kajian literatur.

BAB III Tinjauan Lokasi

Membahas tinjauan umum proyek rusunawa, seperti kondisi lingkungan fisik Kota Yogyakarta dan kecamatan Tegalrejo, potensi wilayah, serta analisa dan peraturan tata guna lahan tapak terpilih di Kelurahan Bener.

BAB IV Metode, Analisis dan Pembahasan Perancangan

Mencakup metode yang akan digunakan untuk melakukan proses analisis

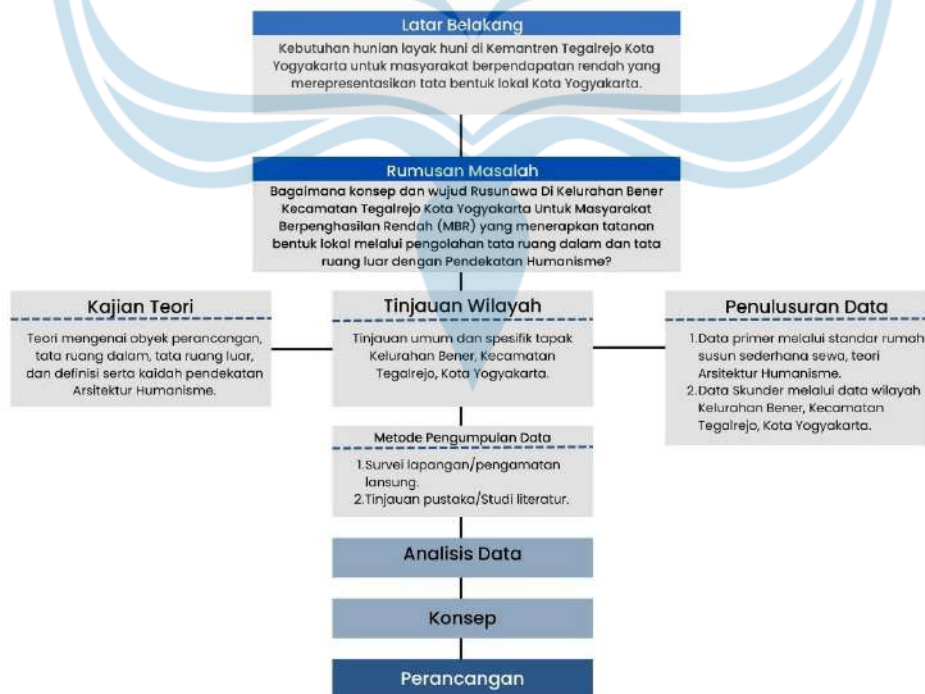
pembahasan khususnya mengenai penelusuran data yang valid dan bertanggung jawab, sehingga dapat digunakan sebagai acuan analisis secara programatis mengenai pelaku, aktifitas pengguna, dan kebutuhan ruang.

BAB V Konsep dan Kesimpulan

Membahas mengenai konsep perancangan yang diterapkan pada perancangan rumah susun sederhana sewa, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari perancangan.

1.8 Alur Pikir

Alur pikir perencanaan Rusunawa berdasar pada tata bentuk lokal, *social architecture*, dan *green architecture* yang ditransformasikan dalam bahasa bentuk tata ruang dalam dan tata ruang luar melalui penelusuran data primer dan kajian teori pendekatan Arsitektur Humanisme. Data primer kemudian di dukung dengan tinjauan dan analisis wilayah Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Data yang telah di analisis kemudian menghasilkan keputusan konsep dan desain perancangan. Skema alur pikir dapat di dapat di uraikan seperti pada diagram di bawah ini:



Gambar 1.1 Pola Pikir Perancangan, Oleh Penulis 2024.

Pada Bab Pendahuluan didapatkan rumusan masalah, bagaimana rancangan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dapat dipenuhi dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme, lingkup pembahasan dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam proses perencanaan, serta alur pikir yang di lakukan penulis dalam menyelesaikan masalah yang ada.



